

Jurnal Skripsi

**KOREAN WAVE SEBAGAI BAGIAN DARI STRATEGI EKONOMI KOREA
SELATAN DI ASIA TENGGARA**

Korean Wave As A Part Of South Korean Economic Strategy In South Asia

Oleh : Lukmanul Hakim

(20140510065)

Abstract

This article discusses how a phenomenon called Korean wave can be an economic strategy for South Korea to improve the country's economy. The cultural sector that is packaged in a band of technology cannot be denied as a potential sector in a country to develop the economy. This writing is a Library Study. That is data collection techniques based on the search for existing issues. The results of this paper conclude (i) the Korean wave is used as an attraction and promotion by South Korea; (ii) the South Korean government supports the spread of South Korean Culture abroad; (iii) South Korea's economy has increased with the benefits of the Korean wave phenomenon.

Keywords: Korean wave, foreign policy, economy of South Korea.

Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan sejak kemerdekaan dan setelah kerusakan besar akibat perang Korea merupakan sebuah contoh keberhasilan pembangunan ekonomi Negara yang paling luar biasa di dunia. Dari titik terendah pada tahun 1953 Republik Korea telah mencapai apa yang disebut sebagai “*keajaiban ekonomi di Sungai Han*”. Setelah berakhirnya perang Korea tahun 1953, income per kapita hanya mencapai 67 dollar, lebih rendah dari sebelum perang dan merupakan salah satu pendapatan yang terendah di dunia. 40% struktur telah

hancur, 2/3-nya dari sektor industri. Produksi pertanian 27% lebih rendah dari masa sebelum perang, sehingga banyak orang Korea Selatan yang kelaparan. Kemudian Korea Selatan memulai pembangunan ekonomi pada tahun 1962, ekonominya telah tumbuh menjadi salah satu yang tercepat di dunia. Transformasi ekonomi di Korea Selatan sungguh luar biasa. Dalam waktu kurang dari 30 tahun Korea Selatan maju pesat dari sebuah negara pertanian menjadi negara industri dan perdagangan. Korea Selatansaat ini dianggap sebagai model ekonomi untuk

disaini oleh negara-negara lain. Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan yang radikal ini dimulai pada masa pemerintahan Jenderal Park Chung-hee yang menduduki posisi penguasa melalui kudeta militer tahun 1961. Park Chung-hee kemudian menjalankan pemerintahan di Korea Selatan secara otoriter. Orientasi pada pasar ekspor sudah sejak awal dipersiapkan Korea Selatan sebagai 'strategi besarnya' untuk menguasai pasar dunia. Karena mereka sadar, dengan kondisi sumber daya alam yang sangat terbatas dan pasar dalam negeri yang kecil. Satu-satunya jalan adalah mengutamakan kegiatan ekspor seperti yang dilakukan juga oleh Jepang.

Dalam melancarkan strategi tersebut, pemerintah memberikan dukungan penuh pada dunia usaha. Dengan menyediakan infrastruktur, modal yang murah, pengenaan pajak yang rendah untuk industri unggulan, dan menyiapkan sumber daya manusia berkualitas tinggi. Efisiensi dan manajemen mutu pada level birokrasi. Dimana para birokrat dididik dengan proses belajar dan disiplin kelas dunia serta berkualitas. Pemangkasan inefisiensi mampu menelorkan kebijakan bermutu tanpa harus melupakan aturan birokrasi. Keberhasilan di bidang industri rupanya membuat Korea Selatan menjadi lebih kreatif. Mengerti akan pentingnya promosi dalam mengenalkan produknya serta sektor ekonomi di sokong oleh kegiatan ekspor maka langkah selanjutnya setelah keberhasilan di bidang industri, pemerintah Korea selatan mengambil langkah menyebarkan budaya Korea Selatan yang harapannya bisa menjadi daya tarik serta promosi bagi produk ekspor mereka seperti contoh, KIA,

Samsung, LG, industri perkapalan, industri baja, kereta api cepat (KTX Bullet Train) dan masih banyak lagi. Kebijakan mengenai penyebaran budaya Korea Selatan ke luar negeri ini di mulai ada sejak tahun 1994 yaitu masa ketika Kim Young Sam menjabat sebagai Presiden Korea Selatan. Beliau mendeklarasikan visi rencana pembangunan yang kemudian dimanifestasikan oleh Menteri Budaya Korea waktu itu, Shin Nak-Yun, dengan menetapkan abad 21 sebagai '*Century of Culture*'. Dengan adanya kebijakan ini, budaya Korea Selatan mulai tersebar hingga memunculkan istilah Korean wave. Korean Wave ini pertama kali teretus pada pertengahan tahun 1999 di Cina oleh jurnalis di Beijing yang terkejut akan popularitas dan minat dari masyarakat Cina terhadap kebudayaan Korea Selatan. Korean Wave di Daratan Cina sendiri dimulai pada tahun 1993 dimana pada saat itu sinema elektronik dari Korea Selatan diimpor dan disiarkan oleh *China Central Television (CCTV)*. Dapat dikatakan Korean Wave dimulai dan menyebar lebih jauh ke negara tetangga setelah kebudayaan Korea Selatan terkenal di Cina.

Rumusan Masalah

Mengapa pemerintah Korea Selatan memilih Korean wave sebagai instrument dalam mengembangkan perekonomian Negara ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk membuktikan bahwa kebijakan Korea Selatan dalam menyebarkan budaya atau yang biasa disebut sebagai fenomena

Korean wave berdampak positif bagi perekonomian negaranya.

Kerangka Teori

Untuk menjelaskan latar belakang masalah dan kemudian menjawab pokok permasalahan maka dalam kerangka teori ini penulis menggunakan konsep diplomasi kebudayaan. Penulis memandang konsep ini relevan dengan kasus yang sedang di bahas, kerna dapat menjelaskan bagaimana sebuah fenomena Korean wave bisa dijadikan sebagai instrument dalam mengembangkan perekonomian Korea Selatan. Menurut Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari dalam bukunya mengenai diplomasi kebudayaan, diplomasi kebudayaan adalah usaha negara untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui dimensi kebudayaan, baik secara mikro seperti pendidikan, ilmu pengetahuan, olahraga, dan kesenian, ataupun secara makro sesuai dengan ciri-ciri khas utama, misalnya propaganda dan lain-lain.

Pembahasan

Adanya perubahan dalam politik luar negeri Korea Selatan karna di sebabkan oleh pergantian pemerintahan sehingga kepentingan nasional pun ikut berubah di setiap rezimnya, untuk menggambarkan politik luar negeri Korea Selatan cukup mudah karna hanya ada dua periode yaitu politik luar negeri periode masa otoriter (1948-1987), kemudian politik luar negeri masa pemerintahan sipil (1992-sekarang)

Pada awal periode pemerintahan otoriter, politik luar negeri Korea Selatan masih berfokus pada upaya menstabilkan fungsi dan sistem pemerintahan terhadap gejolak politik

dalam negeri dan ancaman yang datang dari invansi Korea Utara. Di era Presiden Rhee, Korea Selatan mulai membangun kerjasama dengan Amerika Serikat.

Pada tahun 1961, dibawah pemerintahan Park Chung Hee, Korea Selatan mulai berfokus pada pembangunan perekonomian. Pemerintah mulai terbuka pada masuknya budaya dan ilmu pengetahuan dari luar. Kebijakan ini memberikan hasil positif yaitu semakin majunya perekonomian Korea Selatan. Perubahan orientasi ekonomi yang semula berfokus pada pertanian menjadi industri perdagangan telah mengubah Korea Selatan sebagai salah satu negara yang memiliki kemajuan ekonomi yang sangat pesat dalam waktu kurang dari 50 tahun. Hal ini ditandai dengan diubahnya strategi industri di Korea, dari yang berbasis ISI (Industrialisasi Substitusi Impor) menjadi IOE (Industrialisasi Orientasi Ekspor). Sehingga pembangunan ekonomi Korea Selatan, pada periode tahun 1962-1989 mencapai tingkat pertumbuhan GDP sebanyak 8%; Pendapatan perkapita meningkat menjadi US\$5,199; Nilai tabungan meningkat dari 3.3% menjadi 35.4%; Nilai investasi meningkat dari 12.8% menjadi 35,9%. Kebijakan manufaktur yang didukung kalangan pengusaha muda, berhasil menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu pemain pasar dunia yang paling berpengaruh. Produk-produknya seperti Samsung, LG, Hyundai, dan KIA telah menjadi konsumsi masyarakat internasional. Sejak tahun 1992, pemerintah Korea Selatan mulai digantikan oleh presiden yang berlatarbelakang warga sipil. Masa pemerintahan sipil pertama dipegang oleh Kim Young Sam (1992-1997). Kebijakan luar negerinya yang sangat menonjol adalah kebijakan unifikasi dengan Korea Utara yang dibantu oleh sekutu (Amerika Serikat). Selain unifikasi, kebijakan lain yang dikeluarkan oleh Presiden Kim Young Sam, adalah Segyehwa. Dicetuskan pada 17 November 1994, kebijakan

Segyehwa sebagai reaksi atas fenomena globalisasi, terutama dalam bidang ekonomi, untuk menjadikan Korea sebagai negara yang maju. Salah satu aspek yang mengalami reformasi adalah aspek budaya melalui “Creativity of the New Korea”, dengan tujuan untuk menjaga kelestarian budaya Korea, yaitu dengan tidak meniru budaya asing dan menjadikan budaya Korea sebagai budaya universal yang diterima di seluruh dunia. Selanjutnya pada tahun 1997 berganti menjadi era pemerintahan Kim Dae Jung sampai tahun 2002. Politik luar negeri presiden Kim masih meneruskan kebijakan dari presiden yang sebelumnya yaitu unifikasi dengan Korea Utara. Kebijakan masa pemerintahan presiden Kim disebut sebagai Sunshine Policy. Selain memperbaiki hubungan antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Melalui kebijakan tersebut, Kim mencoba untuk mempengaruhi opini Amerika Serikat terhadap Korea Utara yang selalu menganggap cara-cara tegas dan keraslah yang dapat menyelesaikan konflik kedua negara tersebut. Pemerintah selanjutnya yaitu Presiden Roh Moo Hyun masih gencar untuk memperbaiki krisis Korea Utara dengan Amerika Serikat melalui kebijakan Sunshine Policy yang dikeluarkan oleh Presiden Kim Dae Jung. Namun begitu pada pemerintahan Presiden Roh, fokus utama diplomasinya adalah untuk menstabilkan semenanjung Korea. Hal ini dilakukan setelah munculnya krisis nuklir pada tahun 2002. Upaya penyebaran Korean wave sudah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 1997 ketika terjadi Krisis Finansial Asia. Namun begitu kebijakan-kebijakan yang dibuat pada masa pemerintahan otoriter tidak sedikit yang berfokus untuk menjaga kebudayaan Korea Selatan. Masa pemerintahan Park Chung Hee dalam rangka menangkal pengaruh asing membuat kebijakan-kebijakan kebudayaan seperti Undang-Undang Pertunjukan Publik (1961), Undang-Undang Perfilman (1962), Undang-Undang Promosi Budaya dan Seni

(1972), Publikasi Rancangan 5 Tahun Promosi Budaya dan Seni (1973), Publikasi Rancangan Kedua 5 Tahun Promosi Budaya dan Seni (1978), serta pendirian Korean Motion Picture Promotion Corporation (KMPPC) (1978) dan Korean Culture and Arts Foundation (1973)

Upaya penyebaran Korean wave sudah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 1997 ketika terjadi Krisis Finansial Asia. Namun begitu kebijakan-kebijakan yang dibuat pada masa pemerintahan otoriter tidak sedikit yang berfokus untuk menjaga kebudayaan Korea Selatan. Masa pemerintahan Park Chung Hee dalam rangka menangkal pengaruh asing membuat kebijakan-kebijakan kebudayaan seperti Undang-Undang Pertunjukan Publik (1961), Undang-Undang Perfilman (1962), Undang-Undang Promosi Budaya dan Seni (1972), Publikasi Rancangan 5 Tahun Promosi Budaya dan Seni (1973), Publikasi Rancangan Kedua 5 Tahun Promosi Budaya dan Seni (1978), serta pendirian Korean Motion Picture Promotion Corporation (KMPPC) (1978) dan Korean Culture and Arts Foundation (1973). (euny, 2014)

Era pemerintah Kim Young Sam, mendirikan Biro Industri Budaya untuk mendukung produksi industri budaya sebagai industri strategis nasional melalui peningkatan produksi mandiri, pelatihan sumber daya manusia, partisipasi di pasar perdagangan. Secara konsisten, Pemerintah Korea Selatan mulai mempromosikan industri budaya Korea sejak pemerintahan Presiden Kim Dae Jung (1998 – 2002). Presiden Kim mendeklarasikan dirinya sebagai “culture president” dan berjanji mempromosikan budaya Korea kepada dunia internasional. Hal ini dibuktikan dibuatnya Hukum Dasar Industri Budaya pada tahun 1999 dengan diberikannya alokasi dana sebesar US\$148,5 miliar; pada tahun 2002 meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor

kebudayaan sebesar 1.281.500.000 won atau 1,15% dari total anggaran Pemerintah; menginisiasi integrasi perusahaan bisnis (chaebol). (castelles, 2010)

Kebijakan yang diambil oleh Presiden Kim juga diikuti oleh Presiden ke sepuluh Korea Selatan, Lee Myung Bak yang mengalokasikan dana APBN sebesar 1% untuk perkembangan Korean wave pada tahun 2005. Dibawah kepresidenan Lee, pemerintah memberlakukan “complex diplomacy” and “value diplomacy” sebagai kebijakan utama dalam meningkatkan citra Korea Selatan di mata dunia. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk meningkatkan budaya dan diplomasi publik bersamaan dengan meningkatkan citra dan merek nasional. Untuk dapat mewujudkan fokus utama visi Global Korea pemerintahan Presiden Lee, pemerintah berupaya memperkuat sumber daya manusia yang dimiliki agar kemampuan diplomatik dapat meningkat serta memastikan bahwa Korea Selatan telah sepenuhnya mencerminkan kapasitas nasional dan internasional. Adapun maksud dari Visi Global Korea adalah agar citra bangsa Korea yang tercipta dapat berkontribusi aktif dalam memberikan solusi untuk dapat membantu masyarakat internasional ketika menghadapi suatu permasalahan sehingga tidak hanya bekerja sama saja.

Korean wave atau gelombang Korea merupakan fenomena menyebarnya budaya populer modern dan dunia hiburan Korea Selatan ke Seluruh dunia, yang berupa, drama tv (K-Drama), musik (K-Pop), game, kuliner sampai dengan fashion (K-Fashion) serta gaya hidup, yang tersebar pada tahun 1990an dan masih berkembang dengan versi baru hingga saat ini. (Do Kyun, 2011)

Istilah Korean wave muncul pada tahun 1992 pada saat Korea Selatan menjalin hubungan diplomatic dengan Republik Rakyat

Tiongkok (RRT), Korean wave menjadi sebutan dan di perkenalkan oleh media masa Tiongkok, yaitu Qingnianbao pada tahun 1999, untuk menunjukkan bahwa pada saat itu budaya Korea Selatan sangatlah populer di Negara tersebut.

Berkembangnya Korean wave ternyata membuat pemerintah Korea selatan melirik fenomena ini dan di perluas dengan menambahkan budaya tradisopnal, makanan , bahasa, dan sebagainya di dalam produk hiburannya, hal ini dimaksud supaya semakin banyak yang tertarik dengan sajian produk Korea Selatan.

Korean wave yang di mulainya dengan drama tv, k-pop kemudian memunculkan keingintahuan masyarakat dunia terhadap budaya Korea Selatan. Berbagai aspek budaya tersebut berkembang menjadi ketertarikan kearah bahasa, fashion, kuliner, obat obatan dan sebagainya.

Hal ini tidak luput dari dukungan pemerintahnya, pemerintah korea selatan mendukung penuh persebaran Korean wave, dalam pembukaan sevent conference for the promotion of New Economy di Seoul pada tahun 1994, presiden Korea Selatan saat itu, Kim Young Sam menyatakan siap bersaing dalam bidang budaya dan ekonomi baru di kancan internasional sebagai respons atas tekanan budaya yang datang dari luar negeri. (strinati, 2006)

Sebagai contoh tekanan adalah hegomoni budaya barat dan westernisasi yang semakin kuat, tidak main main dengan perkataannya, melalui kuasanya atas presiden akhirnya melahirkan sebuah kebijakan bernama “lima tahun rencana pengembangan budaya” yang menekankan kebijakan pada pengembangan industry budaya dan pemanfaatan sector teknologi informasi (IT). (Amrosby, 2014)

Korea Selatan adalah salah satu dari sedikit Negara yang memanfaatkan seni dan budaya sebagai komoditas ekspor yang lalu di kembangkan menjadi sebuah soft power dalam berdiplomasi. Kesuksesan Korea Selatan menunjukkan kedigdayaan negaranya melalui budaya dan mampu memaksimalkannya dalam bentuk politik, ekonomi, hingga tentunya berefek pada kemajuan keamanan.

Sebagai bukti nyata dalam fenomena Korean wave adalah keuntungan ekonominya, lihat saja film *winter sonata* (2002) yang meledak di pasaran terutama di kawasan Asia dan mendapatkan pemasukan hingga 290 miliar dollar AS. Ini merupakan potensi nyata dari sektor diplomasi budaya. (Sung, 2008)

Kemudian melihat hal ini, pada masa pemerintahan Kim Dae Jung pada saat konferensi Pariwisata Korea Selatan ketiga pada tahun 2001 menambahkan aspek wisata sebagai kelanjutan dari pertumbuhan ekonomi baru dan Korean wave sebagai pusat dari industri tersebut.

Sebenarnya tidak ada statistik resmi yang menjelaskan dampak Korean wave terhadap perekonomian Korea Selatan. Namun Song Seng Wun dari Bank CIMB private memperkirakan Korean wave berkontribusi dalam produk domestik bruto Korea Selatan sebesar 3-5 %. (Iqbal Yunazwardi, n.d.)

Keseriusan Korea Selatan dalam mengembangkan Korean wave terbukti dari di bentuknya sejumlah institusi/lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam menyebarkan Korean wave. Badan pemerintah yang menaungi Korean wave secara langsung adalah kementerian budaya, olahraga dan pariwisata Korea Selatan (MCST) yang terdiri dari KOCCA, KOFICE, dan KTO

Kesimpulan

Korean wave menjadi instrumen soft power Korea Selatan dengan sumber berupa kebudayaan, yakni budaya populer (*pop culture*), yang diproduksi massal untuk konsumsi publik negara-negara lain. Korean wave tersebut digunakan untuk mencapai tujuan berupa mendapatkan keuntungan ekonomi bagi Korea Selatan. Keuntungan ekonomi bagi Korea Selatan dicapai tidak hanya dengan memperoleh keuntungan dari ekspor produk budaya namun juga melalui pemanfaatan kepopuleran Korean wave di negara-negara lain sebagai daya tarik dan alat promosi dalam memasarkan produk bernilai ekonomi lainnya seperti pariwisata dan produk-produk komersial. Strategi Korea Selatan dalam menggunakan Korean wave untuk mendapatkan keuntungan ekonomi ini dapat ditiru oleh Indonesia. Strategi ini adalah salah satu alternatif yang terkait dengan optimalisasi peran kebudayaan bagi perekonomian negara. Keberhasilan Korea Selatan mempromosikan budayanya tidak hanya memberikan dampak positif bagi identitas budaya bangsa namun juga bagi perekonomian negaranya. Kebudayaan, terutama kebudayaan populer, memang jarang dilibatkan jika kita membahas perekonomian negara. Namun, Korean wave memberikan bukti bahwa kebudayaan adalah sektor yang potensial bagi perekonomian suatu negara. Meski terlihat sebagai sebuah fenomena di dunia hiburan semata, Korean wave sebenarnya telah menjadi instrumen penting yang tidak hanya meningkatkan popularitas Korea Selatan hingga membuatnya dikenal di hampir di seluruh penjuru dunia, tetapi

juga membawa dampak positif bagi perkembangan perekonomian negara tersebut. Oleh karena itu, tidak ada salahnya bagi Indonesia untuk belajar dari Korea

Selatan dan lebih memperhatikan potensi kebudayaan Indonesia sebagai instrumen soft power dalam menghadapi tantangan globalisasi masa kini